



KEBIJAKAN PENDUKUNG DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI DAN KONSUMSI DAGING KAMBING-DOMBA



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2015**

DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI DAN KONSUMSI DAGING KAMBING-DOMBA

Penyusun:

Ismeth Inounu
Atien Priyanti
Sjamsul Bahri
Tjeppy D. Soedjana
Eko Handiwirawan
Mohammad Ikhsan Shiddieqy



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2015**

Hak Cipta @ 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav. E-59
Bogor, 16151
Telp. : (0251) 8322185
Fax : (0251) 8328382; 8380588
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dukungan Kebijakan Dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging
Kambing-Domba/Ismeth Inounu, Sjamsul Bahri, Tjeppy D. Soedjana, Eko
Handiwirawan, Atien Priyanti, Mohammad Ikhsan Shiddieqy. – Jakarta:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2015: vi, 48 hlm;
ilus.; 16 x 20,5 cm.

ISBN : 978-602-8475-90-7

1. Kebijakan	2. Produksi dan Konsumsi	3. Daging
I. Judul;	II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	
III. Inounu, I.		

637.5

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Tata letak dan rancangan sampul: Asep M.

KATA PENGANTAR

Upaya pemenuhan pangan hewani berupa daging sapi dapat disubstitusi dengan ketersediaan berbagai sumber pangan hewani lainnya, salah satunya adalah daging kambing dan domba. Ternak kambing dan domba memiliki keunggulan dapat memproduksi sepanjang tahun karena siklus birahi yang tidak dipengaruhi oleh musim, dapat beranak banyak (*prolific*), dapat dipelihara secara ekstensif, mudah dipasarkan, serta mengatasi risiko usaha dalam hal kematian.

Permintaan pasar terhadap daging kambing dan domba terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban, kebutuhan akikah, serta perkembangan wisata kuliner berupa warung sate dan gulai. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kambing dan domba memiliki potensi ekonomi yang sangat baik dengan prospek pasar yang masih terbuka. Namun, fakta riil di lapang menunjukkan bahwa pihak swasta belum menunjukkan minat yang tinggi dalam pengembangan usaha budidaya kambing dan domba secara komersial dan masif.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) telah mengadakan *roundtable meeting* bertemakan "Dukungan Kebijakan dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging Kambing-Domba".

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga berbagai informasi yang dimuat dalam buku ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk mempersiapkan berbagai strategi dalam menghadapi peningkatan permintaan akan daging kambing dan domba.

Bogor, Juli 2015

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line, positioned above the name.

Dr. Ir. Bess Tiesnamurti, MSc.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Tahapan Kegiatan.....	4
Sasaran dan Tujuan.....	7
Sasaran.....	7
Tujuan	7
Membangun Kapasitas Perumusan Kebijakan	
Pasokan dan Konsumsi Daging Ruminansia	8
Strategi Usaha Pengembangan Kambing-Domba dan Kebijakan Pendukung.....	12
Strategi Usaha Pembibitan Kambing Boer.....	18
Peran Organisasi Profesi Dalam	
Usaha Kambing Domba	24
Langkah Tindak Lanjut dan Rekomendasi	
Kebijakan	27
Matriks Rencana Tindak Strategi dan	
Kebijakan Dalam Meningkatkan Produksi	
dan Konsumsi Daging Kambing-Domba.....	33
Daftar Bacaan	35
Tim Kajian Antisipatif dan Responsif	
Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner.....	36
Tim Perumus.....	37

Lampiran	39
Membangun Kapasitas Perumusan Kebijakan	
Pasokan dan Konsumsi Daging Ruminansia	41
Strategi Usaha Pengembangan Kambing-Domba dan	
Kebijakan Pendukung.....	43
Strategi Usaha Pembibitan Kambing Boer.....	45
Peran Organisasi Profesi (HPDKI) Dalam	
Usaha Kambing Domba	57

PENDAHULUAN

Upaya pemenuhan pangan hewani berupa daging sapi, yang masih menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pertanian dalam RPJMN 2015-2019, dapat disubstitusi dengan ketersediaan berbagai sumber pangan hewani lainnya, salah satunya adalah daging kambing-domba. Pemerintah memprioritaskan program swasembada pangan, sehingga sudah selayaknya produksi pangan di dalam negeri harus terus didorong. Komoditas kambing dan domba yang sebagian besar dipelihara oleh peternak tradisional sebagai mayoritas pelaku usaha, dirasakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga perkembangannya relatif stagnan.

Ternak kambing dan domba memiliki keunggulan dapat berproduksi sepanjang tahun karena siklus birahi yang tidak dipengaruhi oleh musim, dapat beranak banyak (*prolific*), dapat dipelihara secara ekstensif, mudah dipasarkan, serta mengatasi risiko usaha dalam hal kematian dibandingkan ruminansia besar. Beberapa kelebihan lain dari ternak kambing dan domba adalah penanganan dan pemeliharaannya relatif lebih mudah, memerlukan kandang dan jumlah pakan yang lebih sedikit dibandingkan ternak besar sehingga dapat diusahakan oleh peternak dengan kondisi sumberdaya yang relatif terbatas. Permintaan pasar yang terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban, kebutuhan akikah, serta perkembangan wisata kuliner

berupa warung sate dan gulai. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kambing dan domba memiliki potensi ekonomi yang sangat baik dengan prospek pasar yang masih terbuka. Dengan jumlah populasi kambing dan domba yang mencapai lebih dari 32 juta (Ditjen PKH, 2013), sudah selayaknya komoditas ini berperan penting dalam berkontribusi kepada pasokan daging sebagai substitusi daging sapi, yang sampai saat ini sebesar 32% dari kebutuhan masih mengandalkan impor. Dengan demikian, upaya peningkatan konsumsi protein hewani berbasis daging kambing dan domba menjadi hal yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan asupan konsumsi protein hewani yang masih sangat rendah, sekitar 6 gr/kap/hari.

Fakta riil di lapang menunjukkan bahwa walaupun pihak swasta telah mulai banyak yang menjalankan usaha kambing dan domba, namun masih belum berani mengembangkan usaha budidaya kambing dan domba secara besar-besaran dan masif. Daging kambing dan domba kambing dan domba cukup potensial untuk mensubstitusi daging sapi sehingga dengan meningkatnya konsumsi daging kambing dan domba, diharapkan dapat mendukung pencapaian program swasembada daging sapi. Terbatasnya pihak swasta yang mengembangkan usaha budidaya kambing dan domba secara besar-besaran dan masif menjadi salah satu penyebab usaha kambing dan domba kurang berorientasi komersial sehingga sulit mencapai pertumbuhan yang optimal. Usaha penggemukan lebih diminati daripada usaha pembibitan, sehingga di

beberapa daerah bakalan kambing dan domba menjadi sulit diperoleh yang berdampak terhadap melemahnya usaha penggemukan. Oleh karena itu usaha pembibitan perlu didorong dengan berbagai insentif agar dapat mempertahankan dan meningkatkan usaha penggemukan. Berbagai kendala sudah banyak disampaikan dalam berbagai forum maupun hasil-hasil penelitian, namun implementasi di lapang dirasakan masih sangat kurang. Program percepatan dan peningkatan produksi kambing dan domba sangat potensial untuk dikembangkan dengan dukungan kebijakan yang kondusif.

TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan dimulai dengan melakukan suatu *quick random sampling* dalam kunjungan ke dua *farm* usaha kambing dan domba di wilayah Kabupaten Bogor (Tawakal *farm* dan Mande *farm*) pada tanggal 13 Mei 2015. Hasil kunjungan menunjukkan bahwa perlu adanya penetapan wilayah sentra domba, yakni Jawa Barat, sementara untuk kambing adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sumatera Barat dan Lampung. Salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk menjaga keberlangsungan Domba Garut sebagai plasma nutfah Indonesia.

Hipotesa tentang terjadinya pengurasan domba betina produktif belum sepenuhnya diterima, karena sejatinya populasi domba memang meningkat, meskipun tidak signifikan. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya polarisasi usaha akibat pemeliharaan domba yang semakin intensif dengan skala usaha yang lebih besar. Namun, kenyataan juga menunjukkan bahwa jumlah peternak domba relatif sama dengan jumlah pemeliharaan yang masih relatif kecil, sekitar 2-3 ekor/KK. Hal ini mengindikasikan bahwa introduksi teknologi berjalan lambat di tingkat peternakan rakyat.

Guna memperoleh hasil pertumbuhan yang baik, Domba Garut sudah banyak dikawinkan dengan Domba Texel, St. Croix dan Merino, meskipun pemanfaatan domba Merino sudah mulai ditinggalkan. Pemotongan domba betina untuk konsumsi sate dan gulai sulit untuk

dihindari, sehingga perlu disiasati dengan strategi lainnya, seperti misalnya menghasilkan domba dengan bobot badan yang memadai pada umur yang lebih muda. Domba betina menghasilkan daging yang lebih empuk dan hal ini menjadi preferensi utama para pelaku restoran sate dan gulai.

Hasil kunjungan ini ditindaklanjuti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) dengan mengadakan *roundtable meeting* (RTM) bertemakan "Dukungan Kebijakan dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging Kambing-Domba" di Bogor pada tanggal 27 Mei 2015. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menjadi kebijakan yang konstruktif dan implementatif terhadap peningkatan produksi dan konsumsi usaha kambing dan domba. Pertemuan dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai institusi pemerintah maupun *stakeholders* terkait meliputi; Kementerian Pertanian (Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), Kadin Indonesia, Perguruan Tinggi (IPB dan UNPAD), Dinas Peternakan Provinsi (Banten, Jawa Barat), peternak kambing dan domba dan asosiasinya (HPDKI) serta organisasi profesi (PB-ISPI dan PB-PDHI).

Narasumber dari kegiatan ini meliputi:

1. Prof (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Peneliti Senior Puslitbang Peternakan, dengan topik bahasan: "Membangun Kapasitas Perumusan Kebijakan Pasokan dan Konsumsi Daging Ruminansia".

2. Denie Heriyadi, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, dengan topik bahasan: "Strategi Usaha Pengembangan Kambing-Domba dan Kebijakan Pendukung".
3. Martinus Alexander, Direktur PT. Burja, Malang, dengan topik bahasan: "Strategi Usaha Pembibitan Kambing Boer".
4. Rachmat Priatna, Ketua Himpunan Peternak Domba-Kambing Indonesia, dengan topik bahasan: "Peran Organisasi Profesi (HPDKI) dalam Usaha Kambing Domba".

SASARAN DAN TUJUAN

SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pertemuan ini adalah berupa informasi dan saran kebijakan operasional yang kondusif dalam rangka meningkatkan produksi dan konsumsi usaha kambing dan domba di dalam negeri.

TUJUAN

RTM ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mensintesis alternatif/opsi kebijakan terkait dengan pengembangan usaha kambing dan domba yang layak secara teknis, sosial, dan ekonomis untuk kesejahteraan peternak sebagai produsen dan memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat konsumen.

MEMBANGUN KAPASITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PASOKAN DAN KONSUMSI DAGING RUMINANSIA

Bagi sebuah negara yang sedang membangun ekonomi, pemahaman tentang kebijakan dan proses perumusan dalam menghasilkan berbagai keputusan pada berbagai tingkatan sangat penting. Pada kondisi berkembangnya kelompok rumah tangga berpendapatan menengah keatas, maka permintaan produk peternakan akan meningkat, sehingga kebijakan di bidang peternakan sebaiknya menjadi rujukan dasar dalam mencapai tujuan yang utama. Dengan demikian proses perumusan suatu kebijakan yang biasanya agak kompleks, harus mempertimbangkan berbagai hal agar dapat memiliki tujuan yang logis terutama bagi kepentingan publik.

Kebijakan sub sektor peternakan harus dipandang sebagai sebuah tindakan yang dipilih oleh pemerintah, dari sekian banyak alternatif dalam berbagai kondisi yang berbeda, sebagai panduan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan digunakan pada saat ini dan di masa mendatang. Kebijakan pembangunan peternakan di Indonesia pada pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono, direncanakan dilakukan melalui Koridor Ekonomi-5 yang meliputi Pulau Bali-Nusa Tenggara. Hal ini merupakan sebuah kerangka kebijakan pembangunan peternakan untuk mencapai tujuan peningkatan produksi daging sapi di dalam negeri. Diperkirakan dengan memanfaatkan

koridor-5 ini akan tercapai penambahan sekitar 2 juta ekor sapi dalam jangka panjang melalui pengembangan ternak di padang penggembalaan. Permasalahan yang dihadapi pada koridor-5 ini sumber pakan hanya berasal dari ketersediaan hijauan di padang penggembalaan yang masih perlu dilakukan rehabilitasi. Masih terdapat permasalahan hak penggunaan lahan, dan jauhnya jarak antara pusat produksi dan pusat konsumen, disamping terkendala minimnya sarana transportasi.

Program pemerintah di bidang pembangunan peternakan berisi tujuan yang diharapkan serta rincian berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Program ini merupakan sebuah pedoman dasar di bidang pembangunan peternakan yang akan memandu pemerintah dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga, kebijakan pembangunan peternakan dapat didefinisikan sebagai sebuah kerangka pengambilan keputusan atau tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berupa dampak atau perubahan pada sub sektor peternakan. Dalam konteks kepentingan publik, kebijakan pembangunan peternakan juga mendukung tujuan politik pemerintah dalam merespon berbagai perubahan yang sedang berlangsung.

Dalam kenyataannya sumber biomasa hijauan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan berada di koridor-1 dan koridor-3 yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada kedua pulau itu terdapat lebih dari 10 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang

merupakan sumberdaya pakan/biomasa. Dengan demikian kebijakan pembangunan peternakan yang dilakukan melalui sistem integrasi sawit-ternak ruminansia menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Namun tentunya diperlukan dukungan regulasi sub sektor perkebunan (swasta dan BUMN/D) agar dapat mengembangkan model budidaya ternak ruminansia secara terintegrasi dengan kebun sawit. Untuk suksesnya program ini sangat diperlukan adanya dukungan teknologi pasca panen yang baik dan jaminan jaringan pemasaran yang terkendali.

Ternak kambing dan domba merupakan salah satu elemen ketahanan pangan dan diversifikasi pangan hewani. Hampir di seluruh daerah padat penduduk terdapat ternak kambing dan domba. Ternak ini dapat dipelihara secara kombinasi antara dikandangkan dan digembalakan. Kambing terbukti dapat berintegrasi dengan baik pada perkebunan kopi dan kakao, sedangkan domba pada perkebunan karet. Terintegrasinya kambing dan domba dengan perkebunan dapat menciptakan nilai tambah dan pendapatan bagi petani/pekebun. Ternak kambing dan domba dapat dipelihara dengan nilai input terutama pakan secara minimal dan terjangkau, dapat merespon input produksi yang lebih tinggi melalui peningkatan produksi serta produktivitas kelompok ternak. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah per satuan luas areal perkebunan, seperti yang dilakukan pada sistem integrasi sawit-sapi, diperlukan juga dorongan serupa untuk implementasi integrasi ternak kambing dan

perkebunan kakao serta integrasi ternak domba dengan perkebunan karet atau pun dengan perkebunan sawit.

Prioritas kebijakan peningkatan pasokan daging ruminansia dapat dilaksanakan dengan cara mendorong peningkatan nilai tambah sumberdaya input produksi yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui identifikasi masalah dan formulasi kebijakan dan menjaga/mempertahankan diversifikasi sumber pangan hewani, terutama porsi daging ruminansia.

Disamping upaya peningkatan efisiensi produksi daging sapi, diperlukan sistem insentif bagi peternak kambing dan domba untuk meningkatkan skala usaha dan standar kualitas produknya. Untuk itu juga perlu terus dilanjutkan promosi/kampanye peningkatan produksi kambing dan domba seperti pada awal tahun 1990-an yang telah memunculkan banyak pengusaha dan eksportir, serta membangun insentif di tingkat peternak. Untuk mengantisipasi pesatnya respon peternak kambing dan domba terhadap lonjakan permintaan, maka diperlukan upaya pelestarian plasma nutfah kambing dan domba lokal yang diantaranya terkenal sangat *prolific*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbanyak kelompok pembibitan di perdesaan untuk kambing dan domba lokal maupun persilangannya.

STRATEGI USAHA PENGEMBANGBIAKAN KAMBING-DOMBA

Beberapa fakta menunjukkan bahwa populasi kambing dan domba mendapat tekanan besar dan produktivitas yang belum optimal. Hal ini diantaranya adalah bahwa lebih dari 95% kambing dan domba dipelihara secara tradisional, kambing dan domba jantan umumnya dipergunakan untuk qurban dan akikah, sedangkan kambing dan domba betina digunakan untuk memenuhi konsumsi harian. Hasil survey di Jawa Barat menunjukkan bahwa pemotongan kambing dan domba betina produktif sangat tinggi, sekitar 92% dari total pemotongan. Hal ini dapat berakibat terhadap penurunan populasi kambing dan domba secara nasional, dengan salah satu indikasi adalah sulitnya mencari bakalan ternak kambing dan domba untuk usaha penggemukan.

Informasi terkait dengan populasi, kebutuhan dan ketersediaan daging kambing dan domba secara nasional tidak tersedia dengan cukup baik. Terdapat perbedaan data populasi kambing dan domba yang cukup signifikan antara informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga statistik rujukan nasional. Tabel 1 memperlihatkan bahwa menurut Ditjen PKH (2014) populasi domba di Indonesia sebesar 15,7 juta ekor sementara BPS (2013) mempublikasikan populasi domba nasional hanya sebanyak 3,8 juta dengan selisih populasi sekitar 11,9

juta ekor. Demikian pula untuk populasi kambing nasional di antara kedua lembaga tersebut masing-masing mengeluarkan publikasi populasi kambing yang mempunyai selisih sebesar 5,7 juta ekor.

Tabel 1. Perbedaan data populasi kambing dan domba yang dipublikasikan oleh Ditjen PKH dan BPS

Ternak	Populasi (ekor)		Sumber
	Indonesia	Jawa Barat	
Domba	15.715.613	10.003.212	Ditjen PKH (2014)
Kambing	19.216.410	2.592.873	Ditjen PKH (2014)
Domba	3.782.046	2.684.782	BPS (2013)
Kambing	13.491.190	1.020.145	BPS (2013)

Sumber: Heriyadi (2015)

Data pemotongan kambing dan domba secara resmi tidak tersedia karena pemotongan kambing dan domba dilakukan di luar rumah potong hewan, sehingga tidak tercatat dengan baik. Namun demikian pendugaan jumlah pemotongan dapat dilakukan melalui pendekatan penggunaan data jumlah kulit kambing dan domba secara nasional yang dapat diperoleh dari Kementerian Perindustrian. Sementara itu, dengan diketahuinya jumlah pemotongan kambing dan domba, maka populasi kambing dan domba secara nasional dapat diduga dengan beberapa pendekatan di antaranya dengan menggunakan parameter teknis biologis misalnya jumlah anak sekelahiran, jarak beranak, angka kelahiran, *replacement stock*, dan lain sebagainya. Disamping itu pendugaan populasi juga dapat dilakukan dengan kebutuhan kambing dan domba untuk qurban,

akikah dan konsumsi harian. Informasi mengenai populasi dan pemotongan kambing dan domba sangat penting karena tanpa tersedia data yang cukup maka kebijakan dalam upaya memperbaiki kemajuan populasi dan produktivitas ternak kambing dan domba tidak dapat dilakukan dengan baik.

Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan analisis SWOT teridentifikasi usaha kambing dan domba mempunyai (1) Kekuatan (*Strength*): (a) Mempunyai adaptabilitas tinggi terhadap agroekosistem dan (b) Sesuai dengan sosial budaya lokal, (2) Kelemahan (*Weakness*): (a) Rentan terhadap *ecto* dan *endo* parasit, (b) Database populasi kurang baik, (c) Lemahnya penegakan hukum, (3) Peluang (*Opportunity*): (a) Sumber pakan (pangonan, padang penggembalaan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain) tersedia dan (b) Aparatur dan SDM yang cukup, (4) Ancaman (*Threat*): (a) Tingginya pemotongan kambing dan domba betina produktif dan (b) Perubahan cuaca/iklim yang dapat mempengaruhi daya adaptasi.

Tabel 2. Analisa SWOT strategi pengembangan kambing dan domba

Eksternal Internal	Strength : 1. Adaptabilitas tinggi terhadap agroekosistem 2. Sosial budaya lokal	Weakness : 1. Rentan terhadap <i>ecto</i> & <i>endo</i> parasit 2. Database populasi 3. Penegakan hukum
Opportunity : 1. Sumber pakan (pangonan, PP, perkebunan, kehutanan, dll) 2. Aparatur	a. Optimalisasi adaptabilitas yang tinggi untuk memanfaatkan sumber pakan yang luas b. Pertahankan sosial budaya beternak kambing dan domba	a. Minimalisasi serangan <i>ecto</i> & <i>endo</i> parasit di daerah sumber pakan b. Tingkatkan provitas c. Pemutakhiran sensus d. Kerjasama penegakan hukum
Threat : 1. Pemotongan kambing dan domba betina produktif 2. Cuaca	a. Penegakan UU No. 18/2009 Pasal 18 & 86 b. Optimalisasi adaptabilitas tinggi untuk antisipasi kemarau panjang	a. Cegah pemotongan kambing dan domba betina produktif b. Menekan serangan <i>ecto</i> dan <i>endo</i> parasit saat kekurangan hijauan

Sumber: Heriyadi (2015)

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka pengembangan kambing dan domba dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Menggunakan kekuatan dengan

memanfaatkan peluang: Optimalisasi adaptabilitas yang tinggi untuk memanfaatkan sumber pakan yang luas dan mempertahankan sosial budaya beternak kambing dan domba; (2) Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang: Minimalisasi serangan *ecto* dan *endo* parasit di daerah sumber pakan, tingkatkan provitas, pemutakhiran sensus, dan kerjasama penegakan hukum; (3) Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman: Penegakan UU No. 18/2009 Pasal 18 dan 86 dan optimalisasi adaptabilitas tinggi untuk mengantisipasi kemarau panjang; (4) Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman: Pencegahan pemotongan kambing dan domba betina produktif dan menekan serangan *ecto* dan *endo* parasit saat kekurangan hijauan.

Pengembangan pusat-pusat pembibitan kambing dan domba perlu didukung untuk dikeribangkan dalam upaya peningkatan jumlah populasi dan produktivitas kambing dan domba nasional. Penetapan wilayah bibit kambing dan domba perlu memperhatikan dan mengoptimalkan beberapa hal seperti jenis rumpun/galur, rumpun asli/lokal, dominan rumpun > 80%, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi budaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tabel 3 memperlihatkan perbandingan preferensi, stigma, budaya dan harga antara ternak sapi dan kambing dan domba. Berdasarkan faktor-faktor preferensi, stigma, budaya dan harga yang berlaku di masyarakat, maka substitusi daging sapi potong oleh ternak kambing dan domba tidak mudah dilakukan dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pengembangan masing-masing komoditas ternak ini memiliki pangsa pasar yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat langsung tergantikan. Posisi kambing dan domba saat ini adalah sebagai komplemen bagi ternak sapi potong.

Tabel 3. Perbandingan dari segi preferensi, stigma, budaya dan harga antara ternak sapi dan kambing-domba

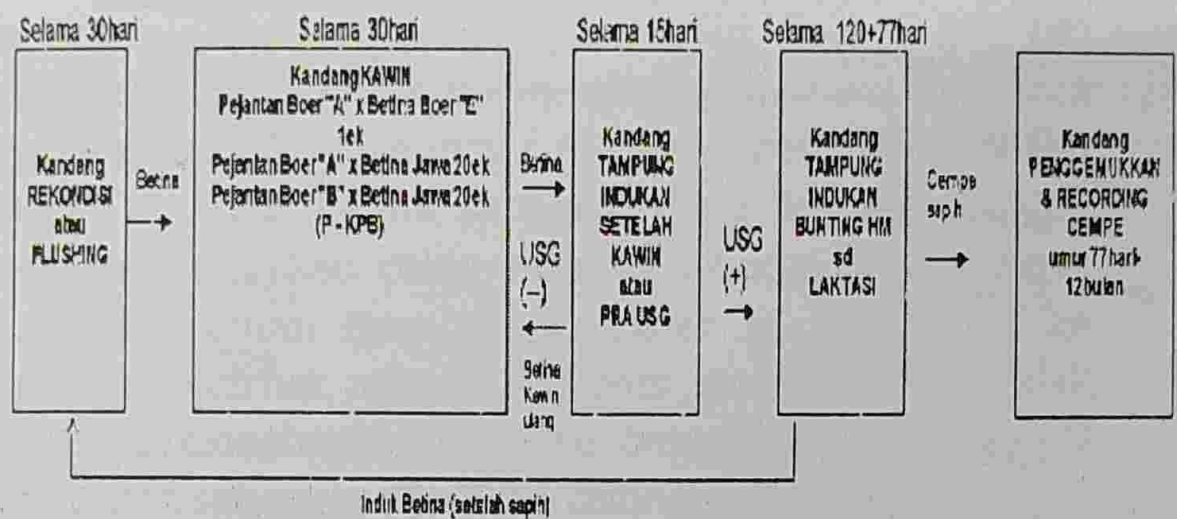
Ternak	Preferensi	Stigma (-)	Budaya	Harga (Rp/kg BB)
Sapi BX	√√	√	-	38.000- 40.000
Sapi lokal	√√√	-	√√	45.000- 50.000
Domba lokal♀	√	√√	√√	40.000
Domba lokal♂	√	√√	√√	60.000
Domba Garut♀	√	√√	√√√	45.000- 50.000
Domba Garut♂	√	√√	√√√	70.000- 80.000
Kambing ♂	√	√√	√	65.000- 75.000

Sumber: Heriyadi (2015)

STRATEGI USAHA PEMBIBITAN KAMBING BOER

Usaha pembibitan ternak kambing dan domba kurang berkembang karena memerlukan modal yang besar dengan masa produksi yang lebih panjang dan keuntungan yang relatif kecil. Sehingga, alternatif kombinasi usaha pembibitan dan penggemukan harus dilakukan guna subsidi silang diantara kedua usaha tersebut, sebagaimana yang dilaksanakan oleh PT Burja pada kambing Boer yang berdomisili di Kota Batu, Malang.

Dalam menjalankan usaha pembibitan, PT Burja memiliki alur produksi *breeding*. Pada tahap awal, kambing ditempatkan di kandang rekondisi atau *flushing* selama 30 hari. Kandang kawin dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Pejantan Boer "A" dikawinkan dengan satu ekor betina Boer "E"; (2) Pejantan Boer "A" dikawinkan dengan 20 ekor betina Jawa; (3) Pejantan Boer "B" dikawinkan dengan 20 ekor betina Jawa. Betina dipelihara di kandang tampung indukan setelah kawin sebelum menjalani USG. Betina akan dikembalikan ke kandang kawin apabila hasil USG negatif, sedangkan apabila hasil USG positif maka akan dimasukkan ke dalam kandang tampung indukan bunting sampai dengan laktasi. Cempu umur 77 hari hingga 12 bulan berada dalam kandang penggemukan dan *recording* cempu. Sementara, induk betina setelah sapih akan kembali ke kandang rekondisi (Gambar 1).



Gambar 1. Alur Produksi Breeding di PT Burja

Sumber: Alexander (2015)

Total populasi kambing yang dipelihara oleh PT. Burja sebanyak 2.425 ekor yang terdiri dari 475 kambing Boer, 50 ekor kambing Jawa lokal dan sisanya adalah kambing persilangan antara Boer dan Jawa lokal (F1, F2 dan F3) (Tabel 4). Total produksi yang dapat dicapai perusahaan ini setiap bulan adalah 30-35 ekor kambing Boer dan 195-235 ekor kambing Persilangan Boer (F1 – F4). Produksi setiap bulan mencapai 225-270 ekor dengan *litter size* sekitar 150-180%.

Secara ekonomi, usaha pembibitan untuk menghasilkan bakalan berada pada kondisi impas dengan masa produksi selama 260 hari, dengan harga mencapai Rp. 695.000/ekor dengan berat sapih rata-rata 14 kg. Jika cempe dijual lebih dari Rp. 695.000/ekor, maka peternak mendapat keuntungan, jika sebaliknya maka peternak akan merugi.

Tabel 4. Populasi ternak sesuai jenis kambing di PT Burja

Jenis Kambing	Populasi (ekor)
Boer jantan	175
Boer betina	300
F1 betina	1150
F2 betina	450
F3 betina	100
Jawa lokal betina	50
F1/F2 jantan (<i>final stock</i>)	200
Total	2.425

Sumber: Alexander (2015)

Pada usaha penggemukan, dengan masa produksi selama 60 hari dapat memberikan keuntungan Rp. 505.000/ekor. Laba bersih per ekor diperoleh dari selisih antara harga jual cempè jantan seberat 25 kg sekitar Rp 1.400.000 (harga 56.000/kg) dengan pengeluaran untuk konsentrat, rumput, operasional, dan cempè sapih sebesar Rp 895.000 per ekor. Konsentrat yang diberikan sebanyak 2% dari bobot badan (25 kg/hari) dengan harga Rp 4.250/kg, sehingga biaya konsentrat dalam sebulan mencapai Rp 127.500/ekor. Rumput yang diberikan sebanyak 3 kg/hari dengan harga Rp 150/kg, sehingga biaya rumput dalam sebulan mencapai Rp 27.000/ekor.

PT. Burja menghasilkan beberapa produk bakalan untuk usaha pembibitan dan penggemukan. Hal ini

meliputi: (a) Anak jantan peranakan Boer (F1 - F4) dijual sekitar 100 ekor/bulan sebagai bakalan/*final stock* ke peternak penggemukan; (b) Anak betina peranakan Boer (F1 - F3) betina sebagian dijual ke *breeder* dan sebagian dijadikan calon indukan sebagai *replacement*; (c) Anak jantan Boer dijual sekitar 15 ekor/bulan ke *breeder*/peternak sebagai *parents stock*; dan (d) Anak betina Boer sebagian dijual ke *breeder* sebagai *parents stock* dan sebagian dijadikan calon indukan.

PT. Burja telah melakukan sistem *recording* dengan baik, meskipun masih mengalami beberapa kendala, diantaranya: (a) Masih rendahnya minat peternak untuk melakukan *upgrading* genetik pejantan maupun betina sehingga penjualan Boer jantan/betina tidak dapat dianggap sebagai sumber pendapatan tetap setiap bulan seperti bakalan (F1-F4) jantan; (b) Tingginya biaya produksi penghasil anak hasil persilangan Boer jantan sebagai *final stock*. Hal ini disebabkan karena genetik dan pakan yang baik kurang mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan hasil bakalan dari peternakan rakyat yang harga jualnya rendah tanpa memperhatikan kualitas genetik kambing yang dipelihara; dan (c) Keterbatasan sumber pakan hijauan dan biaya pengadaan lahan serta kandang yang masih tinggi dengan *return on investment* yang cukup panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Strategi yang dijalankan PT Burja untuk pemasaran Boer sebagai *parent stock* adalah dengan memberikan penyuluhan ke peternak swadaya/penerima bantuan

pemerintah yang terus menerus untuk menumbuhkan minat berusaha. Hal ini juga diiringi dengan memberikan pengertian tentang pentingnya perbaikan genetik dalam usaha peternakan tersebut agar dapat meningkatkan daya saing produktivitas dan efisiensi pakan untuk kambing pedaging dengan kambing Boer sebagai pejantannya. Strategi lainnya adalah dengan membimbing dan membina peternak pemula dalam pemanfaatan kambing Boer sebagai pejantan agar hasil produksi optimal sebanding dengan nilai investasinya. Hal lain yang sangat diperlukan adalah memasyarakatkan pentingnya *recording* yang baik. Selain itu, perlu dukungan dinas-dinas terkait agar lebih menggunakan Boer sebagai pejantan kambing pedaging dibandingkan kambing Senduro/PE (kambing perah).

Strategi pemasaran peranakan Boer Jantan F1, F2 dan F3 sebagai *final stock* adalah dengan aktif memberikan penyuluhan tentang cara penggemukan yang baik dan benar dengan pakan yang efisien agar hasil produksinya dapat bersaing di pasar dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kambing pedaging jenis lainnya. Selain itu, diperlukan upaya membuka peluang pasar penjualan kambing pedaging sebagai kambing potong sebagai daging dalam menu utama harian, bukan hanya pada saat hari raya tertentu.

Kebijakan operasional usaha PT. Burja dijalankan sebagai berikut: (a) Menerima jasa perkawinan kambing Boer dengan kambing Jawa betina lokal milik peternak

dan menjual Peranakan Boer F1 betina bunting ke peternak; (b) Menerima hasil *breeding* dari peternak mitra yang pada waktu sebelumnya membeli kambing bunting Boer agar ada kepastian pasar bagi *breeder*, (c) Menjual kambing Boer *pure breed* dengan harga terjangkau (Rp 5 juta/ekor, umur 1 tahun); (d) Memproduksi peranakan Boer jantan dan betina sampai ke F4 - F5 (kambing Burja) dengan harga terjangkau (Rp 3,5 juta/ekor, umur 1 tahun); (e) Membuka dan membuat sekolah lapang/pelatihan dasar untuk peternak pemula dengan biaya terjangkau atau gratis (bagi peternak tidak mampu).

PERAN ORGANISASI PROFESI (HPDKI) DALAM USAHA KAMBING DOMBA

Dalam upaya peningkatan populasi dan produktivitas, DPP HPDKI dan HPDKI Daerah mendorong peternak kambing-domba untuk dapat beternak secara intensif yang dicirikan dengan: (a) Penggunaan bibit indukan terpilih, (b) Sistem perkandangan memadai, (c) Melakukan pencatatan (*recording*) yang baik, (d) Sistem pakan tertata, (e) Menjalankan manajemen usaha yang baik (*good farming practices*), (f) Peka terhadap lingkungan/pasar, dan (g) Menyatu dalam kebersamaan.

Bibit indukan terpilih harus memenuhi kriteria seperti asal usul yang jelas, memiliki bentuk tubuh ideal, dapat menjadi sumber bibit dengan pencatatan yang baik, dan dapat memberikan keturunan yang baik, kualitas maupun kuantitas. Sistem perkandangan harus bersih dan sehat, tidak mengganggu lingkungan dengan sistem pembuangan/pengelolaan limbah, didukung oleh ketersediaan sumberdaya hijauan dan dapat menjadi percontohan untuk lingkungan atau sebagai "*center of excellence*".

Pencatatan yang baik dilakukan terhadap variabel usaha yang mempengaruhi terhadap kinerja produksi dan ekonomi, seperti mengetahui pejantan, indukan, bobot lahir, sapih, dan bobot minimal untuk perkawinan, serta biaya-biaya untuk pakan, tenaga kerja, dan penjualan produk ternak. Tertatanya sistem pakan dengan menguasai kebutuhan pakan berdasarkan status

fisiologis ternak yang berbeda, misalkan jantan, betina laktasi, betina bunting, dan lain-lain. Sangat penting untuk menguasai bahan baku dan nilai nutrisi pakan, sehingga dapat menentukan penggunaan pakan, di samping dapat menyusun formulasi pakan dengan kekayaan bahan baku lokal, dan peluang untuk menyusun formulasi pakan secara berkelompok.

Perlu adanya manajemen SDM, manajemen pakan, manajemen kandang, dan manajemen pascapanen yang terukur dengan hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hal ini sangat membutuhkan sistem informasi yang sesuai dan mudah diaplikasikan oleh peternak.

Diperlukan adanya persamaan persepsi terhadap permintaan pasar akan kambing-domba. Saat ini bahkan sudah ada pasar aqiqah dengan biaya hanya Rp. 800 ribu/ekor siap saji dan pasar kambing dan domba untuk qurban sekitar satu juta rupiah per ekor. Pasar daging "balibul" dengan trend yang terus meningkat, yang pada kenyataannya adalah kambing-domba betina dapat menguras pemotongan ternak betina produktif.

HPDKI bertekad untuk bersama dalam memenuhi kebutuhan berusaha kambing dan domba, baik pakan maupun bakalan, bersama membangun dan menghadapi pasar, bersama menyelesaikan masalah, bersama menghasilkan produksi berkualitas dan yang terpenting adalah bersama untuk maju.

Program kerja dan usaha HPDKI yang sedang dijalankan, di antaranya meliputi: (a) Membangun usaha

pembibitan domba Garut di beberapa lokasi potensial (DPD Jawa Barat), pembibitan kambing unggul pedaging (DPD Jawa Timur dan Sulawesi Selatan) dan kambing perah (DPD Jawa Tengah) yang telah disampaikan ke Kementerian Pertanian agar dapat direplikasi ke seluruh DPD/Provinsi, (b) Meningkatkan komunikasi dengan para peneliti dalam membantu usaha kambing dan domba di tingkat peternak (kelompok maupun perorangan), (c) Melakukan inventarisasi daerah dan kelompok yang potensial, (d) Menjadi *stakeholder* pemerintah untuk pelayanan informasi dan bantuan kepada peternak, serta (e) Menyusun usulan pengadaan bibit unggul untuk kambing-domba pedaging dan perah.

LANGKAH TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil pemaparan narasumber dan diskusi memberikan beberapa alternatif/opsi rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi langkah tindak lanjut. Hal ini diantaranya adalah:

1. Perlu adanya analisis yang akurat dalam mengestimasi ketersediaan produksi dan konsumsi daging kambing dan domba berdasarkan informasi (data) yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan dari sisi produksi (populasi) yang ada, maupun kebutuhan konsumsi (seperti kebutuhan pasar aqiqah dan hewan qurban). Hal ini sangat penting mengingat pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan bagi peningkatan populasi dan produktivitas kambing dan domba sangat tergantung dari perencanaan yang didasarkan dari data yang akurat.
2. Belum adanya keharmonisan data antara sumber yang satu dengan yang lainnya menyebabkan sangat pentingnya untuk dilakukan sensus ternak kambing dan domba. BPS sebagai pemegang mandat untuk melakukan sensus diharapkan dapat melibatkan HPDKI dalam sensus ini, karena HPDKI mempunyai cabang-cabang di daerah yang dapat membantu mengklarifikasi data-data yang diperoleh.
3. Pemerintah perlu mendorong terbangunnya usaha pembibitan kambing dan domba melalui bantuan

dan insentif bagi investasi di usaha pembibitan dengan pendekatan kawasan. Untuk itu diharapkan adanya kebijakan pemerintah guna memperbaiki genetik kambing dan domba di tingkat peternak dengan arahan yang jelas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat peternak untuk berusaha kambing dan domba.

4. Pewilayahan pembibitan kambing dan domba telah dimulai oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh HPDKI guna menginventarisasi wilayah-wilayah yang potensial untuk pengembangan kambing dan domba yang didukung oleh potensi sumber daya lokal.
5. Dalam pengembangan kambing dan domba terutama ternak bibit perlu ada dukungan dari pemerintah dalam aspek perijinan impor bibit ternak unggul disertai dengan pengawalan intensif dalam pembentukan ternak unggul yang sesuai dengan agroekosistem di wilayah-wilayah potensial.
6. Perlunya pembinaan sistem usaha pengembangbiakan kambing dan domba dengan pola kemitraan yang berkeadilan. Dalam Pasal 31 UU No. 41 Tahun 2014 disebutkan, peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Berkembangnya suatu perusahaan inti

juga dapat meningkatkan minat peternak yang juga tertarik untuk berusaha pada bidang pembibitan. Perlu adanya dukungan dari dinas terkait agar pejantan unggul hasil pemuliaan dapat digunakan sebagai pejantan dalam program-program pemerintah maupun *corporate social responsibility* dari perusahaan.

7. Terbatasnya fasilitas perbanyak ternak kambing dan domba bibit menjadikan salah satu kendala sangat minimnya usahaternak bibit guna memenuhi permintaan peternak pengembang yang berorientasi pasar. Kelembagaan unit perbanyak perlu segera dibentuk guna menjamin usaha ini menjadi usaha yang berkelanjutan. Perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam hal perbanyak kambing dan domba bibit unggul hasil penelitian, yang didampingi tenaga profesional (peneliti/penyuluh) dengan komitmen tinggi sehingga dapat menjamin kinerja produksi secara berkelanjutan.
8. Perlunya pembentukan kelembagaan unit perbanyak benih sumber (UPBS) sebagaimana halnya dengan komoditas padi yang telah memiliki BUMN/Sang Hyang Seri. Pembentukan kelembagaan UPBS dapat mendorong pelaku usahaternak kambing dan domba berorientasi komersial yang dapat memenuhi permintaan pasar. Hal ini memerlukan dukungan yang kuat terkait dengan dinamika kebutuhan dan ketersediaan ternak

kambing dan domba mengantisipasi permintaan yang cenderung terus meningkat.

9. Strategi yang tepat dalam pengembangan agribisnis kambing dan domba adalah dengan mendorong peran peternak dengan tetap memberi kesempatan swasta untuk berkiprah. Kombinasi pendekatan ini dinilai ideal, mengingat keterbatasan kemampuan peternakan rakyat dan juga kemungkinan risiko yang dihadapi oleh pihak swasta. Pemerintah secara aktif dapat memfasilitasi dalam hal investasi untuk mengembangkan usaha ini. Secara mandiri swasta dapat bergerak di sektor hulu (usaha penyediaan calon induk, penyediaan pejantan, penyediaan semen, pabrik pakan mini, dll), serta di kegiatan hilir (RPH, industri pengolahan daging, susu, kulit, kompos dll.). Usaha ternak budidaya oleh swasta dilakukan melalui pendekatan pola kemitraan, dimana peternak menghasilkan bakalan dan inti membeli untuk digemukkan atau langsung dipasarkan.
10. Perlu adanya peningkatan skala usahaternak kambing dan domba seiring dengan upaya meningkatkan populasi sesuai dengan peningkatan permintaan. Perlu adanya dukungan pemerintah dalam aspek perijinan usaha, permodalan dan perlindungan kepastian hukum agar dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan serta jaminan usaha yang berkeadilan yang aman dari serbuan ternak impor di masa mendatang.

11. Meningkatnya permintaan konsumen akan kambing dan domba balibu memerlukan dukungan dari aspek penelitian untuk dapat menciptakan kambing dan domba dengan formulasi pakan yang dapat menghasilkan ternak dengan bobot hidup 30 kg pada umur yang tidak lebih dari setahun dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonominya.
12. UU No. 41/2014, tentang Perubahan atas UU No. 18/2009 tentang PKH Pasal 18, tentang pemotongan betina produktif untuk ruminansia kecil perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini mengingat ternak ruminansia kecil sangat prolifik ($LS=1,5$) dan dapat beranak tiga kali selama dua tahun atau 1,5 kali dalam setahun. Dengan sifat reproduksi yang demikian setiap tahun dari populasi 17 juta ternak betina kambing dan domba dapat dihasilkan anak betina sejumlah 19 juta ekor. Sementara itu, untuk kebutuhan *replacement stock* hanya sebanyak 3,8 juta ekor, sehingga terdapat kelebihan ternak betina sisa seleksi sebanyak 15,2 juta ekor, yang potensial untuk menjadi sumber daging.
13. Pemasaran ternak kambing dan domba untuk hewan qurban dan aqiqah sangat prospektif dan menguntungkan. Disarankan untuk dapat dibentuk suatu industri peternakan yang bergerak dalam bidang ini dengan dukungan pemerintah dalam hal kebijakan lahan usaha, permodalan, bibit, dan sistem bagi hasil yang berkeadilan. Dalam Pasal 36 UU No. 41 Tahun 2014 disebutkan, pemerintah

berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pemasaran diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.

Matriks Rencana Tindak Dukungan Kebijakan dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging Kambing-Domba

Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
I. UPAYA PENINGKATAN POPULASI TERNAK KAMBING DAN DOMBA			
Sensus ternak kambing dan domba yang akurat	Data populasi ternak kambing dan domba, data produksi serta konsumsi daging kambing dan domba	2015 - 2016	BPS, Ditjen PKH, HPDKI
Penelitian pembentukan bibit unggul tipe pedaging dan tipe perah	Bibit ternak kambing dan domba untuk produksi daging dan susu	2015 - 2019	Badan Litbang Pertanian, Ditjen PKH, HPDKI PT
Program insentif bagi investasi di usaha pembibitan dengan pendekatan kawasan	Strategi pembiayaan dan kemudahan mendapatkan bibit kambing dan domba	2015 - 2016	Ditjen PKH, HPDKI
Inventarisasi penetapan wilayah pembibitan kambing dan domba	Penetapan wilayah potensial untuk pengembangan kambing dan domba	2015-2016	Ditjen PKH, HPDKI, Badan Litbang Pertanian PEMDA

II. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PEMBIBITAN TERNAK			
Pola kemitraan yang berkeadilan	Model pola kemitraan yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak	2015-2016	Ditjen PKH, HPDKI, Badan Litbang Pertanian
Pembentukan kelembagaan unit perbanyak benih sumber (UPBS)	Perbanyak kambing dan domba bibit unggul hasil penelitian	2015 – 2019	Badan Litbang Pertanian, Ditjen PKH, HPDKI
Penelitian genetik dan formulasi pakan yang optimal	Formulasi pakan untuk menghasilkan kambing dan domba dengan bobot hidup sesuai pasar	2015 - 2016	Badan Litbang pertanian, HPDKI.
III. DUKUNGAN KEBIJAKAN			
Perlunya Legalisasi pemotongan betina produktif untuk ruminansia kecil	Perubahan atas UU No. 18/2009 tentang PKH Pasal 18, tentang pemotongan betina produktif untuk ruminansia kecil	2015 - 2016	Ditjen PKH

DAFTAR BACAAN

- Alexander, Martinus. 2015. Strategi Usaha Pembibitan Kambing Boer. Makalah dipresentasikan pada *Roundtable Meeting* (RTM) "Isu Kebijakan dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging Kambing-Domba", Bogor 27 Mei 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Sensus Pertanian 2013.
- Heriyadi, Denie. 2015. Strategi Usaha Pengembangan Kambing dan domba dan Kebijakan Pendukung. Makalah dipresentasikan pada *Roundtable Meeting* (RTM) "Isu Kebijakan dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging Kambing-Domba", Bogor 27 Mei 2015.
- Priatna, Rachmat. 2015. Peran Organisasi Profesi (HPDKI) dalam usaha kambing domba. Makalah dipresentasikan pada *Roundtable Meeting* (RTM) "Isu Kebijakan dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging Kambing-Domba", Bogor 27 Mei 2015.
- Soedjana, TD. 2015. Membangun Kapasitas Perumusan Kebijakan Pasokan dan Konsumsi Daging Ruminansia. Makalah dipresentasikan pada *Roundtable Meeting* (RTM) "Isu Kebijakan dalam Meningkatkan Produksi dan Konsumsi Daging Kambing-Domba", Bogor 27 Mei 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor: 33/OT.050/I.5/01/2015 Tanggal 23 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, maka Tim dimaksud adalah:

**TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN RESPONSIF
KEBIJAKAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN
VETERINER**

1. Prof (R) Dr. Syamsul Bahri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Prof (R) Dr. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Prof (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak
5. Prof (R) Dr. Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
6. Dr. drh. Suhardono, Balai Besar Penelitian Veteriner
7. Dr. Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
8. Dr. Eko Handiwirawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

9. Dr. Wisri Puastuti, Balai Penelitian Ternak
10. Priyono, S.Pt., MS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
11. Mohammad Ikhsan Shiddieqy, S.Pt., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

TIM PERUMUS

1. Prof (R) Dr. Ir. Ismeth Inounu, MS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Dr. Ir. Eko Handiwirawan, M.Si., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
5. Mohammad Ikhsan Shiddieqy, S.Pt., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Die vorliegende Arbeit ist eine
Zusammenfassung der Ergebnisse
einer Untersuchung über die
Einflussnahme der Temperatur
auf die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse. Die
Versuche wurden in der
Physikalisch-chemischen
Anstalt der Universität
Leipzig durchgeführt.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

Die Geschwindigkeit der
Zuckerhydrolyse ist
von der Temperatur
abhängig. Die
Temperaturerhöhung
beschleunigt die
Hydrolyse.

WANGUN KAPAL
FRANKLIN PERKINSON
DAGUNG KAPAL

Tahun 1900

...
...
...
...
...

...

LAMPIRAN

MEMBANGUN KAPASITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PASOKAN DAN KONSUMSI DAGING RUMINANSIA

Tjeppy D. Soedjana

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian

RINGKASAN

Pemahaman tentang kebijakan dan proses perumusan dalam menghasilkan berbagai keputusan pada berbagai tingkatan sangat penting. Proses perumusan kebijakan, yang biasanya agak kompleks, harus mempertimbangkan berbagai hal agar memiliki tujuan yang logis terutama bagi kepentingan publik. Kebijakan pembangunan peternakan adalah sebuah kerangka pengambilan keputusan atau tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berupa dampak atau perubahan pada sub sektor peternakan. Proses perumusan kebijakan pada umumnya melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (i) Identifikasi masalah, (ii) Formulasi kebijakan, (iii) Adopsi kebijakan, (iv) Implementasi kebijakan, dan (v) Evaluasi kebijakan.

Prioritas kebijakan peningkatan pasokan daging ruminansia meliputi: (i) Mendorong peningkatan nilai tambah sumberdaya input produksi yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui identifikasi masalah dan formulasi kebijakan; (ii) Menjaga dan mempertahankan diversifikasi sumber pangan hewani, terutama porsi daging ruminansia; (iii) Perlunya sistem insentif bagi peternak kambing dan domba untuk meningkatkan

skala usaha dan standar kualitas produknya; (iv) Melanjutkan sukses kampanye peningkatan produksi kambing dan domba seperti pada awal tahun 1990-an yang telah memunculkan banyak pengusaha dan eksportir, dan membangun insentif di tingkat petani; (v) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah per satuan luas areal perkebunan, seperti yang dilakukan pada sistem integrasi sawit-sapi, diperlukan dorongan serupa untuk implementasi integrasi ternak kambing dan perkebunan kakao serta integrasi ternak domba dengan perkebunan karet; (vi) Mengantisipasi pesatnya respon peternak kambing dan domba terhadap permintaan, diperlukan upaya pelestarian plasma nutfah kambing dan domba lokal yang diantaranya terkenal sangat *prolific*, melalui memperbanyak kelompok pembibitan di perdesaan untuk kambing dan domba lokal maupun persilangannya.

Ternak kambing dan domba merupakan elemen ketahanan dan diversifikasi pangan hewani karena: (i) Hampir seluruh daerah padat penduduk terdapat ternak kambing dan domba; (ii) Kambing terbukti dapat berintegrasi dengan baik pada perkebunan kopi dan kakao, dan domba pada perkebunan karet dalam menciptakan nilai tambah dan pendapatan pekebun; (iii) Kambing dan domba dapat dipelihara dengan nilai input minimal dan terjangkau, serta dapat merespon input produksi yang lebih tinggi.

STRATEGI USAHA PENGEMBANGAN KAMBING DAN DOMBA DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG

Denie Heriyadi

Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran

RINGKASAN

Beberapa fakta menunjukkan bahwa kondisi populasi kambing dan domba di Indonesia mendapat tekanan besar dan produktivitas yang belum optimal, di antaranya adalah bahwa lebih dari 95% kambing dan domba dipelihara secara tradisional, kambing dan domba jantan umumnya dipergunakan untuk qurban dan akikah sementara itu kambing dan domba betina umumnya digunakan untuk konsumsi harian. Pemotongan kambing dan domba betina produktif untuk konsumsi harian dari hasil survey sangat tinggi, di Jawa Barat mencapai 92% dari total pemotongan. Kondisi tersebut dapat berakibat penurunan populasi kambing dan domba secara nasional dan sulitnya pedagang untuk mencari bakalan dapat merupakan indikasi menurunnya populasi kambing dan domba.

Data populasi, kebutuhan dan kecukupan ternak kambing dan domba secara nasional tidak tersedia dengan cukup baik. Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sehingga sangat menyulitkan di

dalam menentukan kondisi populasi kambing dan domba saat ini. Ditjen PKH (2014) mempublikasikan bahwa populasi kambing di Indonesia sekitar 19,2 juta ekor, dan domba sekitar 15,7 juta ekor. Sementara itu menurut BPS (2013) populasi kambing sekitar 13,5 juta ekor dan domba sekitar 3,8 juta ekor. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sensus terhadap populasi kambing dan domba serta parameter lain sangat diperlukan untuk memudahkan di dalam membuat kebijakan bagi peningkatan populasi dan produktivitas kambing dan domba di Indonesia.

Berdasarkan faktor-faktor preferensi, stigma, budaya dan harga yang berlaku di masyarakat, maka substitusi daging sapi potong oleh ternak kambing dan domba tidak mudah dilakukan dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pengembangan masing-masing komoditas ternak ini memiliki pangsa pasar yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat langsung tergantikan. Posisi kambing dan domba saat ini adalah sebagai komplemen bagi ternak sapi potong.

Saat ini usaha kambing dan domba yang lebih berkembang adalah usaha penggemukan, sedangkan usaha pembibitan tidak berkembang dengan baik. Kondisi tersebut akan menurunkan perkembangan usaha penggemukan kambing dan domba akibat suplai bakalan yang menurun. Pemerintah perlu mendorong usaha pembibitan kambing dan domba melalui bantuan dan insentif bagi investasi di usaha pembibitan dengan pendekatan kawasan.

STRATEGI USAHA PEMBIBITAN KAMBING BOER

Martinus Alexander

PT. Burja, Malang

RINGKASAN

Usaha pembibitan ternak kambing dan domba kurang berkembang karena memerlukan modal yang besar dengan masa produksi yang lebih panjang dan keuntungan yang relatif kecil. PT Burja, Malang melaksanakan alternatif kombinasi usaha pembibitan dan penggemukan yang dilakukan untuk subsidi silang diantara kedua usaha tersebut. Saat ini PT Burja melakukan usahaternak dengan total populasi kambing yang dipelihara sebanyak 2.425 ekor yang terdiri dari 475 kambing Boer, 50 ekor kambing Jawa lokal dan sisanya adalah kambing persilangan antara Boer dan Jawa lokal (F1, F2 dan F3). Total produksi yang dapat dicapai perusahaan ini setiap bulan adalah 30-35 ekor kambing Boer dan 195-235 ekor kambing Persilangan Boer (F1 – F4). Produksi setiap bulan mencapai 225-270 ekor dengan *litter size* sekitar 150-180%.

Secara ekonomi, usaha pembibitan untuk menghasilkan bakalan berada pada kondisi impas dengan masa produksi selama 260 hari, sedangkan untuk usaha penggemukan dapat memberikan keuntungan Rp. 505.000/ekor dengan masa produksi selama 60 hari. Jenis produk bakalan anak kambing dan jumlah yang telah dihasilkan untuk usaha pembibitan dan penggemukan oleh PT Burja meliputi: (a) Anak

jantan peranakan Boer (F1 - F4) dijual sekitar 100ekor/bulan sebagai bakalan/*final stock* ke peternak penggemukan; (b) Anak betina peranakan Boer (F1 - F3) betina sebagian dijual ke *breeder* dan sebagian dijadikan calon indukan sebagai *replacement*; (c) Anak jantan Boer dijual sekitar 15 ekor/bulan ke *breeder*/peternak sebagai *parents stock*; dan (d) Anak betina Boer sebagian dijual ke *breeder* sebagai *parents stock* dan sebagian dijadikan calon indukan.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah: (a) Masih rendahnya minat peternak untuk melakukan *upgrading* genetik pejantan maupun betina sehingga penjualan Boer jantan/betina tidak dapat dianggap sebagai sumber pendapatan tetap setiap bulan seperti bakalan (F1-F4) jantan; (b) Tingginya biaya produksi penghasil anak kambing hasil persilangan Boer jantan sebagai *final stock* karena genetik dan pakan yang baik kurang mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan hasil bakalan dari peternakan rakyat yang harga jualnya rendah tanpa memperhatikan kualitas genetik kambing yang dipelihara; dan (c) Keterbatasan sumber pakan hijauan dan biaya pengadaan lahan serta kandang yang masih tinggi dengan ROI yang cukup panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi.

PERAN ORGANISASI PROFESI (HPDKI) DALAM USAHA KAMBING DOMBA

Rachmat Priatna

DPP Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia

RINGKASAN

Dalam upaya peningkatan populasi dan produktivitas kambing dan domba di Indonesia, DPP HPDKI dan HPDKI Daerah mendorong peternak kambing dan domba untuk dapat beternak secara intensif yang dicirikan dengan: (a) Penggunaan bibit indukan terpilih, (b) Sistem perkandangan memadai, (c) Melakukan pencatatan (*recording*) yang baik, (d) Sistem pakan tertata, (e) Menjalankan manajemen usaha yang baik (*good farming practices*), (f) Peka terhadap lingkungan/pasar, dan (g) Menyatu dalam kebersamaan. HPDKI bertekad untuk bersama dalam memenuhi kebutuhan berusaha kambing dan domba, baik pakan maupun bakalan, bersama membangun dan menghadapi pasar, bersama menyelesaikan masalah, bersama menghasilkan produksi berkualitas dan yang terpenting adalah bersama untuk maju.

Program kerja dan usaha HPDKI yang sedang dijalankan, diantaranya meliputi: (a) Membangun usaha pembibitan domba Garut di beberapa lokasi potensial (DPD Jabar), pembibitan kambing unggul pedaging (DPD Jatim dan Sulsel) dan kambing perah (DPD Jateng) yang telah disampaikan ke Kementan agar dapat direplikasi ke seluruh DPD/Provinsi, (b) Meningkatkan komunikasi dengan para peneliti dalam

membantu usaha kambing dan domba di tingkat peternak (kelompok maupun perorangan), (c) Melakukan inventarisasi daerah/kelompok yang potensial, (d) Menjadi *stakeholder* pemerintah untuk pelayanan informasi dan bantuan kepada peternak, dan (e) Menyusun usulan pengadaan bibit unggul untuk kambing dan domba tipe pedaging dan tipe perah.

ISBN : 978-602-8475-90-7

Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

Telp. (0251) 8322185, 8322138

Fax. (0251) 8328382, 8380588

E-mail : criansci@indo.net.id